



BKPSDM KUKAR

RENCANA KINERJA TAHUN 2026

dibuat oleh:

**SUBBAG KEU &
ASET BKPSDM**

+62 811-5415-581

Kompleks Bupati Kukar Gedung E Lt. 3

www.bkpsdm.kukarkab.go.id

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya semata, Dokumen "Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026" ini dapat diselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen rencana kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini juga merupakan paparan agenda kerja dan target kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rangkaian Tugas pokok tersebut terdokumentasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini yang disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan dari tiap Bidang dan atau Sub Bagian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan memperhatikan aspek keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi masing masing. Dalam program kerja ini juga disampaikan usulan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran atas program dan tugas serta fungsi yang ada sesuai dengan kebutuhan yang senantiasa berkembang.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2026 ini juga merupakan penjabaran operasional kegiatan di tahun 2026 yang telah disusun bersama seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara serta menjadi acuan kerja dan target kinerja selama tahun 2026.

Tenggarong, 3 Desember 2025
Kepala BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
W. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
A	Latar Belakang	1
B	Dasar Hukum	2
C	Tugas Pokok dan Fungsi	3
D	Struktur Organisasi	3
BAB II	VISI, TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
A	Visi	4
B	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	5
BAB III	STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN	6
A	Strategi dan Kebijakan	6
B	Program dan Kegiatan	7
C	Rencana Kinerja Tahunan	8
BAB IV	PENUTUP	11
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	5
Tabel 2	Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	6
Tabel 3	Rencana Kinerja Tahunan	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatannya.

RKT Tahun 2026 merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan selama 5 tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini disusun mengacu berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dan Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21); dan

18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 42 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berkedudukan di bawah Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. pelaksanaan program kerja dan administrasi di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. penyusunan laporan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. mengoordinasikan pelaksanaan penerapan pengelolaan kinerja Pegawai Daerah;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

D. Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahkan dan mengordinasikan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN
5. Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
6. Bidang Mutasi dan Promosi; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

BAB II

VISI, TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut **“ Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia ”**. Berdasarkan visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya,
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah; dan
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara adalah misi ke 1 yaitu : **“ Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani ”** yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Program Prioritas dalam misi pertama yang dirumuskan adalah Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), Program ASN Bahagia dan Program Kutai Bebaya.

Adapun peranan keterlibatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (dalam tupoksi BKPSDM) untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi dengan tujuan :

“ Mewujudkan tata kelola administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang efektif, efisien dan akuntabel ”

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Tahun 2016 – 2021, yang bertujuan untuk memberikan acuan dan landasan serta arah bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pada fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yaitu:

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia.

Misi : 1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani

Tujuan : Meningkatnya profesionalitas ASN Kutai Kartanegara

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Meningkatnya profesionalitas ASN Kutai Kartanegara		Indeks Profesionalitas ASN	81
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	88

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan maka dibutuhkan pengimplementasian rumusan kebijakan strategis yang nantinya menjadi sebuah pedoman perumusan dan operasionalisasi program selama 5 (lima) tahun dari renstra yang telah ditetapkan. Kebijakan strategis dimaksud adalah; *“Penyiapan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan melaksanakan penataan aparatur secara equal dan tepat, dengan meningkatkan kualitas aparatur tersebut melalui manajemen aparatur pemerintah daerah yang berdasarkan pada standar kompetensi dan merit system”*.

B. Program dan Kegiatan

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Perencanaan program dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan.

Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD. Setiap program selanjutnya diterjemahkan kedalam kegiatan.

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (Outcome) suatu program. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

C. Rencana Kinerja Tahunan

Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tahun : 2026

No	Hasil Analisis Kebutuhan		
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	77,90 Nilai
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	27 Laporan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
2	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Layanan
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	127 Dokumen
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan

7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450 Dokumen
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 nit
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 aporan
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	12 Unit
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit
	Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	95 Persen

	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1306 ASN
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen
4	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga
5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
6	Pengelolaan data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen
7	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2473 ASN
36	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen
37	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen
38	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen
	Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	9154 PNS
39	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	600 Orang
40	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	3 Dokumen
41	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang
42	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	50 Orang
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	10854 ASN

43	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
44	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
45	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan
46	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348 Orang
47	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan
48	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Dokumen
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	27,85 Persen
	Pengembangan kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	3000 ASN
49	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	550 Orang
	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	106 ASN
50	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	90 Orang
51	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan

BAB IV ***PENUTUP***

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 suatu dokumen yang merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Indikator kinerja dan program yang ditentukan dalam dokumen ini diharapkan dapat diukur capaian kerjanya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah disusun dalam rencana strategis tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja tahunan memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Tenggarong, 3 Desember 2025

Kepala BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara



H. RAKHMADI, S.Sos

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19660107 200012 1 003